

### **BAB III**

#### **PERAN NANI WARTABONE DALAM SEJARAH KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pada bab ini akan dibahas peristiwa 23 Januari 1942 yang terjadi di Gorontalo, sebuah pergerakan rakyat serta kepemimpinan Nani Wartabone dalam melawan penjajahan pasukan Belanda dan Jepang serta dipaparkan juga peranan penting tokoh-tokoh nasional dalam perjuangan rakyat Gorontalo. Pada bab ini juga dibahas latar belakang sosial politik kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta.

#### **3.1 Pristiwa 23 Januari 1942**

##### **3.1.1 Pergerakan Rakyat**

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, telah terjadi berbagai peristiwa di daerah-daerah yang ingin membebaskan diri dari pemerintah penjajah Belanda. Peristiwa-peristiwa itu dicantumkan pada Pergerakan Rakyat Indonesia. Gerakan itu dilaksanakan dengan cara yang terorganisir, karena tujuannya adalah untuk perbaikan derajat bangsa yang terorganisasi dengan baik dan rapi, serta didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan organisasi politik. Ada gerakan yang secara menyeluruh, tetapi juga ada yang muncul pada setiap daerah tertentu tetapi pada hakekatnya sama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Misalnya gerakan yang terjadi di Jawa, di Sumatra, Ambon, Jakarta, Sulawesi, dll (Pringgodigdo, 1980:VIII). Sifat pergerakan itu antara lain bersifat politik, kedaerahan, serikat sekerja. Keagamaan, gerakan wanita, pemuda dan lain-lain. Aksi-aksi yang terorganisasi secara modern itu didukung oleh munculnya tokoh-tokoh yang mempunyai kecakapan dan terdidik, rasa tidak senang kepada

penjajah, kesadaran rasa kebangsaan yang makin tumbuh, dan juga faktor pengaruh luar negeri yaitu kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Semua ini menjadi daya dukung dan pendorong semangat ingin mencapai cita-cita luhur, yaitu kemerdekaan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Cita-cita ini lebih menampakkan wujud nyata, ketika terjadi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dapat menyatukan seluruh aspirasi bangsa Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah, suku-suku bangsa, dan perbedaan agama dan budaya.

### **3.1.2 Gerakan Patriotik**

Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo, merupakan salah satu dari mata rantai rangkaian pergerakan rakyat Indonesia. Aksi rakyat yang dipelopori oleh tokoh Nani Wartabone dan diperkuat oleh teman-temannya itu, dapat dikatakan sebagai salah satu pilar yang men perkokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Secara analogi, walaupun hanya terjadi di daerah Gorontalo, pada saat itu daerah dan rakyat Gorontalo telah dibebaskan dari pemerintahan penjajah Belanda. Pada saat itu pula, pemerintahan di Gorontalo beralih dari penjajah Belanda kepada sebagian rakyat Indonesia. Dapat dikatakan, terjadi suatu proklamasi kecil di Gorontalo yang secara langsung atau tidak merupakan awal mula dari peristiwa kemerdekaan nasional.

Dilihat dari sifat perjuangannya, maka peristiwa itu termasuk gerakan patriotik. Patriotik adalah semangat cinta tanah air, atau sikap yang suka berkorban segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air (Moeliono, 1988:654). Makna patriotik itu mewarnai peristiwa 23 Januari 1942. Tekad bulat pimpinan dan

rakyat pada saat itu, adalah ingin mengubah nasib rakyat dan melindungi tanah air dan kekayaannya, dari kesewenang-wenangan Belanda. Contoh-contoh sifat patriotik pada tokoh Nani Wartabone adalah tidak bersedia menerima jabatan dari pemerintah Belanda, justru dia selalu menentang. Akibatnya dia selalu dicurigai oleh Belanda. Ia lebih suka berkebutuhan dengan rakyat, sambil menggempleng mereka agar menyadari makna perjuangan untuk merdeka, daripada menerima tawaran Belanda.

### **3.1.3 Paradigma Budaya**

Peristiwa 23 Januari 1942 bukan hanya bernuansa politik dan nasionalisme dengan jiwa patriotisme, tetapi juga bernuansa budaya. Dalam lembaga (pranata) budaya Gorontalo, terdapat suatu petuah bagi pemimpin yaitu *Bangusa talalo* yang artinya Bangsa dijaga dan *Lipu poduluwalo* yang artinya Tanah air dibela. Tokoh Nani Wartabone dan penggerak lainnya, berjuang untuk mempertahankan bangsa dan membela rakyat, agar tidak hancur oleh tindakan Belanda yang mulai kalap pada masa-masa mendekati kekalahan mereka. Nani Wartabone ingin menjaga milik rakyat yang ada di Gorontalo dari upaya penghancuran, bahkan pembumihangusan oleh Belanda. Dengan berpegang pada budaya menjaga bangsa dan membela rakyat, maka peristiwa itu menghindarkan Gorontalo dari kerusakan. Bahkan moral dan etika dipertahankan, sehingga tidak terjadi perampasan harta kekayaan, tidak ada penjarahan, dan tidak terjadi pembalasan dendam terhadap orang-orang Belanda dan keluarga mereka. Inilah yang menyebabkan peristiwa itu berwujud gerakan kemerdekaan yang tidak berdarah. Harus diakui bahwa cita rasa budaya Indonesia dan daerah seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, persamaan,

kerakyatan, dan musyawarah untuk mufakat merupakan pilar-pilar untuk mengembangkan semangat keindonesiaan, semangat kebangsaan (Wirosardjono, dalam Amal, 1998:42). Cita rasa budaya seperti itulah yang menjiwai Nani Wartabone pada saat memimpin gerakan 23 Januari 1942.

## **3.2 Pristiwa Republik Indonesia di Gorontalo**

### **3.2.1 Sejarah Lokal**

Penulisan sejarah nasional dan lokal tidak dapat dipisahkan. Sejarah nasional memerlukan fakta-fakta dari sejarah lokal, yang kemudian dirangkum menjadi sejarah nasional atau sejarah Indonesia. Taufik Abdullah menyatakan (1990:13) bahwa penamaan sejarah nasional atau sejarah Indonesia mencakup zaman dari seluruh daerah yang kini disebut Republik Indonesia haruslah diterima tak lebih daripada nama berdasarkan konsensus. Walaupun demikian sejarah daerah harus ditinjau secara sungguh-sungguh, sesuai fakta yang ada di daerah itu. Sejarah nasional memerlukan integrasi dari berbagai lokalitas, yang pada sejarah lokal hal itu tidak diperlukan. Kedua tingkat sejarah ini bisa berkaitan tetapi keduanya secara metodologis harus terpisah. Pemberontakan di daerah, tentu sama sekali tidak bisa diterangkan dengan baik tanpa memperhitungkan situasi politik ekonomi nasional. Pada sisi lain sejarah lokal haruslah mempunyai otonomi. Sebab dengan otonomi itu dapat diharapkan memberikan sesuatu yang berharga, baik untuk sejarah nasional, atau idealnya untuk memperdalam pengertian tentang diri dan manusia lain (Abdullah, 1990:19).

Secara khusus, penulisan sejarah lokal, yang bernuansa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, merupakan pilar yang sangat penting dalam memberikan gambaran secara menyeluruh perjuangan bangsa Indonesia yang pluralistik. Skenario perjuangan rakyat di setiap daerah, merupakan sejarah mikro bagi bangsa Indonesia, yang apabila dikaji secara ilmiah dengan pendekatan yang tepat akan dapat memperkaya data sejarah nasional Indonesia. Beberapa varian lokal, latar belakang lokal yang terkait dengan faktor sosio-kulturalnya akan memberikan penguatan yang strategis dan bermakna historis terhadap sejarah bangsa. Gejala-gejala historis pada setiap daerah tidak bisa terangkat secara nasional kalau tidak dituliskan atau ditampilkan dalam bentuk dokumentasi. Penulisan historiografi daerah-daerah seperti ini mengandung dua informasi penting: (1) informasi yang terkait dengan gejala atau peristiwa lain yang sejenis di seluruh Indonesia, dan (2) informasi yang berhubungan dengan sejarah nasional (Kartodirdjo, 1994:223).

Urgensi penulisan sejarah meliputi penemuan kembali identitas suatu suku bangsa dan bangsa. Sejarah nasional, dengan demikian dapat menggambarkan identitas bangsa Indonesia. Karena itu perlu diupayakan penggalian fakta-fakta masa lampau atau sejarah, atau tepatnya sejarah nasional. Sejarah nasional menjadi simbol identitas nasional, sehingga ia berfungsi selaku kerangka kepribadian nasional beserta ciricirinya yang perlu dimiliki setiap warga negara. Ini berarti, pendidikan sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pendidikan nasional (Kartodirdjo, 1999:20).

Sejarah lokal mempunyai fungsi utama untuk menyempurnakan fakta-fakta yang berguna dalam menyusun sejarah nasional. Terutama sejarah perjuangan pergerakan nasional, memerlukan fakta historis dari sejarah perjuangan pergerakan di daerah-daerah. Sebenarnya pergerakan memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai dan dimatangkan oleh berbagai pergerakan yang bersifat nasional di daerah-daerah. Salah satu perjuangan pergerakan bersifat nasional yang terjadi di Gorontalo, pada tanggal 23 Januari 1942

### **3.2.2 Penulisan 23 Januari 1942**

Pistiwa 23 Januari 1942 adalah salah satu pilar yang mematangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Pelopor peristiwa ini adalah Nani Wartabone, Bersama dengan teman-temannya. Yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Gorontalo. Pengaruhnya sampai sepanjang teluk Tomini. Mereka bertekad untuk merdeka atau bebas dari penjajahan Belanda, dan sepakat bahwa Nani Wartabone adalah pemimpinnya (Tuloli, dalam Hendrowinoto, 2003 : 297). Gerakan ini mempunyai kesamaan ide dengan gerakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Jakarta dan Makassar. Semua gerakan ini tujuannya adalah perbaikan hidup bangsa Indonesia. Yaitu lepas dari penjajahan Belanda dan bangsa manapun ( Pringgodigdo, 1980 : 8).

Fakta historis 23 Januari 1942 haruslah dilihat dari sebab akibat, maksudnya apa, dan yang melatarbelakangi timbulnya peristiwa itu, dan apa terjadi setelah peristiwa itu. Latar belakang yang menggambarkan ketokohan Nani Wartabone, dukungan dari partai politik, pemuda, pandu dan organisasi. Demikian pula dengan kegiatan Nani Wartabone dengan para teman-temannya, yang mendukung

munculnya peristiwa tersebut. Hasil kajian inilah yang diharapkan akan memperkaya pengetahuan mengenai sejarah lokal Gorontalo khususnya perjuangan Nani Wartabone dalam melawan penjajahan Belanda pada saat itu.

### **3.3 Pergerakan Nani Wartabone di Gorontalo**

#### **3.3.1 Ketokohan Nani Wartabone**

Suatu gerakan bersejarah bagaimanapun kecilnya, pasti mengandalkan seorang atau beberapa tokoh. Tokoh itulah yang menjadi pemimpin yang dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi, serta mengikat dan mempererat perekat para pengikutnya. Gerakan seperti ini dapat disamakan dengan suatu kelompok atau kumpulan orang, yang secara terorganisasi dan spontan, untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin inilah yang menjadi titik tumpuan para pengikutnya untuk mengatur, menggerakkan, dan memutuskan cara terbaik dalam suatu kelompok gerakan. Kepribadian seorang tokoh pemimpin massa hendaklah mempunyai karakteristik ulet, orisinalitas pribadi dan kepercayaan diri yang kuat (Gibson. 1985:336).

Nani Wartabone, lahir 30 Januari 1907 dan wafat di Suwawa, Gorontalo, 3 Januari 1986 pada umur 78 tahun adalah putra Gorontalo dan tokoh perjuangan dari provinsi Gorontalo. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003. Ia seorang pejuang yang aktif berorganisasi dan berjuang melawan kolonialisme di daerahnya pada masa perjuangan kemerdekaan.

Nani Wartabone adalah seorang tokoh pemimpin massa yang bersifat informal, yang mampu menggerakkan para pengikutnya. Seorang pemimpin informal, seperti Nani Wartabone, bisa menjadi penggerak dan pelopor karena mempunyai latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya dan perilakunya. Dia mempunyai integritas pribadi dengan kualitas objektif dan subjektif untuk tampil sebagai pemimpin pada masyarakat (lihat, Winardi, 2000:38).

Louis Gottschalk (1985:169) mengakui pentingnya kepemimpinan dan personalitas dalam gerakan sosial. Kepribadian seorang tokoh dalam peristiwa sejarah memberikan makna yang penting untuk menempatkan seseorang individu di dalam kerangka sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Tokoh Nani Wartabone memiliki personalitas yang sangat kuat, baik pada masa kecilnya, pada masa perjuangannya, maupun pada masa tuanya. Dialah tokoh yang dicintai rakyat, benci pada penindasan, suka pada kedamaian, dan menentang penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan kerugian rakyat.

Para ahli sejarah mengakui bahwa terjadinya suatu peristiwa pasti ada faktor penyebab. Faktor-faktor itulah yang menggerakkan dan memotivasi peristiwa itu (Gottschalk. 1985:164). Dalam konteks ini kita melihat faktor keberadaan Nani Wartabone yang mampu membaca situasi. dan dapat mengambil keputusan yang tepat itulah sebagai faktor utama.

Faktor lain adalah situasi rakyat di Gorontalo, pemerintahan Belanda di Indonesia, dan makin mantapnya pergerakan politik dan nasionalisme pada saat itu. Nani Wartabone bukan hanya memanfaatkan situasi atau kesempatan itu, tetapi justru lebih kreatif lagi menciptakan kesempatan. Dari penuturan saksi mata, pernah

Nani Wartabone datang ke kota sendiri lalu mengacungkan senjata sambil memberikan ultimatum kepada Belanda. Hal itu dilakukannya ketika telah terdengar bahwa Belanda akan membumihanguskan sumber-sumber vital kekayaan rakyat. Di sini integritas dan keberanian untuk bertindak merupakan faktor penentu. Ancaman itu menjadi tanda bahwa Belanda tidak ditakuti rakyat, artinya wibawanya menurun di mata rakyat.

### **3.3.2 Pengaruh Tokoh-Tokoh Nasional**

Nani Wartabone adalah tokoh di Gorontalo yang mempunyai relasi yang banyak dengan tokoh-tokoh nasional. Ia bukan tokoh tradisional, yang terpencil dan hanya dikenal di daerahnya saja, tetapi sejak di Surabaya ia telah mengenal dan dikenal oleh beberapa tokoh pergerakan nasional.

Tokoh idolanya yang banyak berpengaruh dalam jiwanya adalah proklamator Indonesia, Bung Karno. Ia pernah tinggal dengan Soekarno di Bandung selama beberapa minggu. Bersama tokoh nasional itu, ia menemukan dan mematangkan konsep dan jiwa nasionalisme. Ia juga dapat mengambil teladan jiwa besar dan patriotisme Bung Karno.

Dalam beberapa kesempatan, Nani Wartabone yang masih pemuda itu, ikut berdiskusi politik dengan tokoh-tokoh lain. Ia banyak berdiskusi dengan Mohamad Yamin, Soetomo, H.O.S. Cokroaminoto, dan lain-lain. Kalau kita mengkaji ketokohan tokoh-tokoh nasional itu, tentu saja dapat dipastikan dalam diri Nani Wartabone terdapat panorama yang unik gabungan dari jiwa dan semangat tokoh-tokoh nasional itu. Ia dapat menimba berbagai konsep dari para tokoh itu, yang akhirnya memperkuat semangat pergerakan kebangsaan pada dirinya. Di sini dapat

dipahami, bahwa adalah tepat kalau Nani Wartabone dapat dimasukkan pada tokoh nasional yang ada di Gorontalo. Karena konsep nasionalisme dari berbagai tokoh itu, menjiwai perjuangan dan kepribadiannya.

### **3.4 Pembinaan Semangat Kemerdekaan**

#### **3.4.1 Kepemudaan dan Kepanduan**

Pemuda mempunyai andil yang besar dalam menyiapkan calon-calon pemuka nasional, dan terutama memperkuat rasa cinta tanah air. Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) lahir sebagai perkumpulan pemuda yang pertama. Ini terjadi di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 di gedung perkumpulan Budi Utomo (Pringgodigdo, 1980:21). Di semua daerah muncul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti di Jawa, di Sumatra, di Minahasa, di Ambon, dan dapat dikatakan di seluruh Indoensia. Mereka itu antara lain diunsuri oleh para siswa (murid) sekolah menengah dan pemuda-pemuda lain yang bukan pelajar. Pada masa itu terbentuklah *Jong Java*, *Jong Sumatramen Bond*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, dan lain-lain. Ketika Nani Wartabone di Surabaya, ia bersama teman-temannya Uno, Abd. Rasjid Tangahu, dan Jassin mendirikan *Jong Gorontalo*, pada Desember 1923 sebagai bukti semangat kebersamaan dan nasionalisme. Ia tidak ketinggalan dengan pemuda-pemuda dari daerah lain.

Pemuda-pemuda di Gorontalo tidak ketinggalan dengan daerah lain. Mereka juga membentuk kelompok pemuda yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pemuda, misalnya perkumpulan pemuda Islam (*Jong Islamieten Bond*). Tokoh-tokoh yang sering disebut-sebut antara lain Tom Olil, A.R. Ointu, U.H. Buluati, dan lain-lain. Mereka menggerakkan jiwa dan semangat pemuda melalui tablig-tablig,

peringatan hari-hari besar Islam, musyawarah, dan dakwah-dakwah. Keanggotaannya terdiri atas pelajar dan pemuda-pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan, termasuk pemuda di kampung-kampung.

Bersamaan dengan gerakan kelompok pemuda muncul pula gerakan kepanduan. Prinsip kepanduan adalah menjadi wadah penggodokan pemimpin atau kaderisasi. Kepanduan lebih luas lagi, mulai dari anak-anak sekolah rakyat (SD), murid sekolah menengah, dan orang yang telah dewasa, bahkan yang tua-tua. Tetapi inti kepanduan adalah pemuda. Mereka bisa bergerak dalam berbagai aktivitas, termasuk olah raga dan kesenian. Gerakan kepanduan yang muncul di Gorontalo pada waktu itu adalah Sarekat Islam Afdeling Pandu (SIAP) dari Sarekat Islam, Hizbul Wathon (HW) dari Muhammadiyah, National Islamitische Padvinderij (Natipi) dari Jong Islamieten Bond.

Tokoh Nani Wartabone dapat diterima pada semua organisasi pemuda dan kepanduan itu. Ini ada hubungannya dengan sifat supelnya, luas pengetahuannya, dan kemampuan menarik hati para pemimpin dan massa. Ketika ia dilarang dalam gerakannya, maka ia beralih ke kegiatan sosial Muhammadiyah. Namun demikian cita-cita kemerdekaan tetap ditanamkannya kepada masyarakat. Pada tahun 1938, Nani Wartabone menjadi Ketua Panitia Musyawarah Muhammadiyah seluruh Gorontalo, yang dipusatkan di Suwawa. Hal ini membuktikan bahwa ia tidak terlalu mengikatkan diri kepada partai politik. Ia dipercaya memimpin dalam semua kalangan, golongan, dan organisasi.

Sebagai tokoh pemuda, ia juga dekat dengan tokoh-tokoh agama Islam. Antara lain dapat disebutkan adalah Nadjamuddin, yang berkedudukan sebagai Khadi Suwawa. Nani Wartabone seringkali mengundang khadi itu untuk berdiskusi tentang perjuangan kemerdekaan dari sisi agama Islam. Dalam kegiatan-kegiatan kekeluargaan sering ia mengundang para pemangku dan tokoh agama. Setiap kegiatan itu selalu diisi dengan tukar-menukar pandangan yang berhubungan dengan perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Melalui dialog agama ia mendapat kekuatan batin untuk teguh dalam perjuangan. Ia percaya bahwa siapa yang berjuang di jalan Allah akan mendapat perlindungan dan kemenangan.

#### **3.4.2 Budaya *Hulunga***

Berbagai siasat dan cara dapat dipakai untuk mematangkan sasaran perjuangan. Para tokoh dapat menggunakan agama sebagai wadah, politik sebagai alat, juga budaya sebagai sistem atau siasat. Pada bagian sebelumnya, telah diungkapkan bahwa peristiwa 23 Januari 1942 mempunyai nuansa budaya (kultural).

Dukungan masyarakat secara keseluruhan terhadap ketokohan Nani Wartabone adalah karena perjuangannya yang menggunakan siasat budaya Gorontalo, yang dipadukan dengan politik dan agama. Simbol budaya sebagai pranata dalam masyarakat Gorontalo, yaitu *hulunga* dimanfaatkan untuk menggembleng pemuda dan petani. *Hulunga* adalah suatu pranata budaya yang menghimpun orang untuk bekerja di sawah, di kebun, atau dalam pesta. *Hulunga* dalam makna yang luas adalah sama dengan bergotong royong. Gagasan ini didukung oleh pendirian Persatuan Tani pada bulan November 1927.

Dengan simbol *hulunga*, Nani Wartabone mengajak pemuda dan rakyat untuk bekerja sama dalam perkebunan dan pertanian. Mereka berjumlah lebih kurang 300 orang. Pasukan *hulunga* inilah yang menjadi pasukan inti pada waktu peristiwa 23 Januari 1942. Mereka setia dan taat kepada Nani Wartabone, karena penampilan kepribadiannya. Pemuda dari berbagai desa di sekitar Suwawa, ada juga dari luar Suwawa, disatukan dalam satu kegiatan itu. Mereka selain diajak meningkatkan kesejahteraan, memanfaatkan lahan, juga dibina agar tidak tergantung pada orang lain. Pada kesempatan bertani itu ditanamkan pula rasa cinta tanah air, keberanian, dan cita-cita untuk merdeka. Mereka diajarkan nyanyian Indonesia raya. guna menggugah semangat kebangsaan. Konsep-konsep politik dan perjuangan dibicarakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, bendera merah putih dipancangkan di tengah kebun atau pertanian, di mana mereka berhimpun untuk bekerja. Bendera ini dijahit oleh istri Nani Wartabone. Ia berjuang bersama Nani Wartabone, sebagai dukungan terhadap perjuangan suami. Ada juga bendera-bendera kecil yang mereka simpan sebagai tanda anggota *hulunga*. Peranan istri Nani Wartabone pada persiapan dan pembinaan semangat sangat penting. Semua urusan anak-anak dan rumah tangga dilaksanakan, sehingga Nani Wartabone dapat berkonsentrasi pada perjuangan. Ia juga membuat dan menyimpan bendera merah putih pada saat genting. Misalnya pada saat NICA menggeledah keluarga yang memiliki bendera merah putih, maka sang istrilah yang menyembunyikan bendera itu. Termasuk kegiatannya menyebarkan semangat kebangsaan pada ibu-ibu tetangga. Ada waktu-waktu tertentu, misalnya pada

istirahat Nani Wartabone berbicara dan berceramah kepada pemuda kelompok *hulunga* itu. Dengan pranata *hulunga* rakyat diberdayakan, ditumbuhkan kesadarannya terhadap jati dirinya sebagai bangsa, dan ditanamkan keberanian berkorban demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Melalui *hulunga*, Nani Wartabone menyatukan rakyat pengikutnya. Ia bekerja bersama rakyat, sehingga sifat kerakyatannya sangat menonjol. Tidak heran kalau ia dicintai dan dipatuhi oleh pengikutnya. Tokoh yang memberi manfaat kepada rakyat, dan tidak mengambil sesuatu apapun dari rakyat. Tokoh yang lebih banyak berbuat untuk rakyat melalui simbol budaya *hulunga*, dan menolak untuk mendapat jabatan dan kedudukan dari penjajah Belanda. Ia berpegang pada semboyan "rakyat yang harus di bela" agar dapat menikmati kekayaan tanah airnya (lihat, Tuloli, dalam Hendrowinoto, Ed, 2003:297).

Pengaruh positif budaya *hulunga* itulah yang menyebabkan mulus dan suksesnya peristiwa 23 Januari 1942. Keunikan yang timbul dari pranata ini terhadap peristiwa tersebut adalah: (1) terpanggilnya rakyat secara serentak dan ikhlas untuk berjuang di bawah pimpinan Nani Wartabone, (2) timbulnya kepercayaan tanpa ragu terhadap kepemimpinan Nani Wartabone. (3) gerakan rakyat bersama tanpa melihat ras, kelas sosial, golongan, jabatan, dan agama, (4) norma kemanusiaan yang tinggi diilhami oleh jiwa dan semangat yang luhur, dan (5) keberanian yang tinggi untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tanpa pamrih.

### **3.4.3 Dukungan Partai Politik**

Menurut informasi Sinyo Hasan (Wawancara: 4 Desember 2003) partai yang pertama kali masuk di Gorontalo adalah partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Setelah itu muncullah partai-partai lain, seperti Nahdatul Ulama, Partai Nasional Indonesia (PNI), Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Nani Wartabone sendiri mendirikan PNI tahun 1928, yang kemudian menjadi Partai Indonesia (Partindo). Selain partai-partai politik yang berasal dari luar, beberapa kaum terpelajar di Gorontalo seperti Husain Katili, Saleha Nina, Patiduhu Monoarfa mendirikan organisasi Sinar Budi. Organisasi ini bertujuan menghimpun seluruh rakyat Gorontalo, meniru wadah organisasi di pulau Jawa.

Nani Wartabone walaupun berada dalam Partindo atau PNI, namun tetap mempunyai hubungan dan pertalian yang erat dengan pemimpin dan tokoh-tokoh partai politik lain. Hubungan mereka disebabkan oleh adanya persamaan persepsi dan pandangan terhadap perjuangan rakyat, juga karena hubungan kultural. Nani Wartabone dipandang sebagai tokoh yang dapat mempersatukan semua partai dalam menghadapi dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Mereka sering mengadakan pertemuan, walaupun Nani Wartabone selalu dimata-matai Belanda. Ketika Mr. Ishak (tokoh nasionalis) datang ke Gorontalo, membakar semangat rakyat menentang kolonialisme, Nani Wartabone mendapat teguran kepala polisi Belanda. Dengan berani ia menantang, bahkan sampai dibawa ke Asisten Residen. Dengan keberaniannya itu, Belanda itu menjadi gentar lalu melepaskannya. Semangat dan keberanian Nani Wartabone itulah pula yang menyebabkan tokoh-tokoh partai dan organisasi sosial dan pemuda mendudukkannya dalam posisi

sebagai pelopor. Banyak ide-ide dan keputusan-keputusan dari tokoh-tokoh yang harus dikonsultasikan atau dibicarakan dengan Nani Wartabone. Kalau mendapat kesepakatan, maka hal itu sudah merupakan legitimasi bahwa ide dan keputusan itu dapat dilaksanakan. Dalam posisi puncak seperti ini, Nani Wartabone menjadi tumpuan kepercayaan dan tumpuan harapan para tokoh partai politik.

Sikap Nani Wartabone yang tidak membedakan partai, golongan, dan kelompok masyarakat itulah yang menyebabkan ia diangkat sebagai ketua Komite 12 pada bulan Desember 1941 walaupun ia tidak hadir dalam penentuan itu. Komite 12 itu terdiri atas para tokoh partai politik dan organisasi sosial. Kusno Danupoyo, sebagai Ketua GAPI, menjadi salah seorang anggota di dalam komite itu. Jadi dalam sisi politik, kharisma kepemimpinan Nani Wartabone tetap menjadi penentu dalam mempersiapkan gerakan kemerdekaan. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak terbawa arus satu partai, tetapi tetap tegak berada bersama-sama dengan semua partai politik. Ia menjadi motor terciptanya harmonisasi, stabilisasi, dan kesearahan perjuangan seluruh organisasi kemasyarakatan dan politik.

### **3.5. Pematangan Situasi**

#### **3.5.1. Kondisi Bangsa Indonesia**

Perjuangan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah telah dilakukan di berbagai daerah di Nusantara jauh sebelum abad-20. Hanya perjuangannya belum bersifat nasional atau kebangsaan untuk membentuk suatu negara bangsa. Setelah adanya kaum terpelajar Indonesia dan adanya politik Balas Budi dari Bangsa Belanda, maka muncullah kesadaran rakyat Indonesia akan kepincangan sosial, kebodohan, dan kemiskinannya. Mereka yang mengenyam

pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya mulai mengembangkan pergerakan dan kebangkitan nasional.

Pergerakan itu meliputi pergerakan politik, pergerakan serikat pekerja, pergerakan keagamaan, pergerakan wanita, dan pergerakan pemuda. Semua ini muncul hampir bersamaan pada awal abad ke-20. Pada masa itulah muncul berbagai partai politik dan organisasi di Indonesia, yang mula-mula masih mempunyai ruang lingkup terbatas, dan lama-kelamaan makin luas. Pergerakan politik yang menonjol, makin tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan telah mempunyai cabangcabangnya. Para tokohnya telah bergerak dengan para pengikutnya untuk memberikan kesadaran dan membangkitkan semangat perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Gerakan perkumpulan di daerah pun mulai timbul di manamana, dan dengan cara yang sama ingin membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Sejak tahun 1908 sampai dengan tahun 1942 muncullah Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Studie club-Studie club, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerindo, Partai Persatuan Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai Indonesia Raya, PSII, Penyedar, PII, dan PSII ke-2, GAPI, dan Majelis Rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, walaupun organisasi ini mempunyai dasar pendirian yang berbeda-beda, namun tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah. serta ingin mewujudkan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda.

Situasi bangsa Indonesia pada saat itu telah mempunyai nilai-nilai perjuangan sebagai berikut: (1) kebebasan atau kemerdekaan politik, (2) harga diri kepribadian bangsa, dan (3) solidaritas. Nilai-nilai ini menjadi motivasi utama anti penjajahan (kolonialisme) (Kartodirdjo, 1994:247). Kondisi seperti ini terpantau oleh Nani Wartabone. Ia menggunakan radio yang selalu didengarnya tiap hari, surat kabar yang diperoleh dari teman-teman wartawan dan tokoh politik dan pemuda, serta anggota polisi yaitu Pendang Kalengkongan. Pendang inilah yang mula-mula menyampaikan kepada Nani Wartabone tentang jatuhnya negeri Belanda kepada Jerman dalam Perang Dunia II bulan Mei 1940 (lihat Setiawan, Ed. 13. 1994:37), dan bagaimana kondisi pemerintah Belanda di Gorontalo. Nani Wartabone makin yakin, bahwa pada suatu saat akan terjadi suatu peristiwa perebutan kekuasaan dari tangan penjajah.

### **3.5.2 Situasi Penjajahan Belanda**

Pemerintah Belanda mengalami kemerosotan karena: (1) makin maraknya penentangan terhadap mereka oleh berbagai gerakan, (2) jatuhnya negeri Belanda ke tangan Jerman. Pada saat itu terjadi kepincangan dalam pemerintahan Hindia Belanda, dan putusnya hubungan Indonesia dengan negeri Belanda (Pringgodigdo, 1980:195). Para pemimpin pergerakan Indonesia, menuntut dengan keras dan bersama-sama agar pemerintah Hindia Belanda membentuk satu panitia yang akan menyelidiki segala kepincangan. Panitia itu dikenal dengan "Commissie Visman" pada tahun 1940. Lapornya keluar tahun 1942, yaitu beberapa minggu sebelum bala tentara Dai Nippon masuk ke Jawa.

Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta bersedia bekerja sama dengan pihak pemerintah Jepang, yang dulunya bersifat non-koperatif dengan Hindia Belanda. Faktor penyebab kerja sama itu adalah kepercayaan kepada ramalan Joyoboyo, bahwa akan datang orang-orang kate yang akan menguasai Indonesia selama umur jagung, dan sesudah itu kemerdekaan akan tercapai. Faktor lain adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia, tahun 1905, yang berarti kemenangan Asia terhadap Eropa (Nugroho Notosusanto, VI, 1993:15).

Perang pasifik yang pecah pada tahun 1941, lebih membuka peluang bagi bangsa Indonesia. Beberapa wilayah di luar pulau Jawa mengadakan pergolakan dengan membunuh dan memenjarakan pejabat-pejabat Belanda, seperti di Sulawesi Selatan, Gorontalo. dan Sumatra Barat (Reid, 1996:15). Suasana makin gawat bagi Hindia Belanda, ketika tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerbu Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika terbesar di Pasifik. Jepang menyerbu ke Hindia Belanda dimulai dengan menduduki Tarakan, 11 Januari 1942, lalu berturut-turut Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda (Notosusanto, VI, 1993:1).

Sesuai informan (Sinyo Hasan, wawancara: 7 Desember 2003), Manado jatuh ke tangan Jepang tanggal 11 Januari 1942. Orang-orang Belanda di Manado lari melalui darat ke Poso. Belanda di Gorontalo mulai takut. Mereka bersiap-siap untuk melarikan diri, tetapi akan membumihanguskan dulu semua kekayaan rakyat. bangunan vital. Sasaran pembumihangusan yang direncanakan Belanda adalah pelabuhan, gedung kopra. lapangan olah raga. irigasi. jembatan, dan kapal motor. penyimpanan minyak, gedung beras, dan lain-lain. Persiapan pembumihangusan itu

disampaikan oleh Pendang Kalengkongan kepada Nani Wartabone. Jadi pemerintah Belanda baik di Indonesia maupun di Gorontalo dalam keadaan yang sangat lemah dan kalut. Inilah kesempatan yang ditunggu oleh Nani Wartabone. Ia tinggal menunggu saat yang tepat untuk berbuat demi rakyat.

### **3.5.3. Kondisi Penentu**

Beberapa hari menjelang 23 Januari 1942, terjadi beberapa peristiwa yang dapat memicu segera diadakan aksi perebutan kekuasaan dari penjajah Belanda. Peristiwa itu antara lain adalah sebagai berikut.

Pada hari senin, tanggal 19 Januari 1942, Nani Wartabone datang ke kota Gorontalo lalu mengancam Belanda dengan ancaman akan memenggal kepala mereka jika mereka membakar kekayaan rakyat dan tempat-tempat vital. Kemudian ia menempatkan orang-orang sebagai mata-mata di tempat-tempat itu untuk mencegah tindakan pembumihangusa yang dilakukan oleh tentara Belanda. Peringatan itu sebenarnya untuk menakut-nakuti Belanda. Hal ini adalah bukti keberanian Nani Wartabone.

Belanda balas mengancam akan menangkap Nani Wartabone. Tiga hari Nani Wartabone istri dan anaknya, serta ayahnya menunggu polisi Belanda. Ternyata tidak ada yang datang. Ketika muncul kakaknya Ayuba Wartabone, maka ayahnya menyatakan bahwa ia akan melindungi dan membela Nani Wartabone. Ayuba Wartabone pun secara diam-diam mendukung perjuangan Nani Wartabone. Ia bermain secara halus agar tidak dicurigai Belanda.

Pada hari Kamis, kapal motor Kalolio dan sembilan gudang kopra di pelabuhan Gorontalo hangus dilalap api. Ada informan yang menyatakan, hal itu adalah hasil pemboman Jepang. Tetapi dalam tanggomo Manuli, sebagai wartawan tradisional budaya daerah Gorontalo, mengungkapkan hal itu adalah tindakan Belanda. Informan lain, mengungkapkan sama dengan Manuli. Nani Wartabone (Temey Jonu) melihat peristiwa itu, lalu kembali ke kampungnya dan mengumpulkan keluarga, ayahnya, dan tokoh-tokoh pemuda untuk bersiap-siap menangkap Belanda. Itulah awal persiapan terjadinya peristiwa 23 Januari 1942. Pada malam Jumat itu, atau malam tanggal 23 Januari 1942 ia menyiapkan senjata, mengumpulkan rakyat dan pemuda anggota hulunga. Ada pula kurir-kurir yang dikirim ke wilayah-wilayah secara rahasia. Kerahasiaan dijaga ketat, agar tidak diketahui oleh Belanda dan kakitangan Belanda.

Peranan beberapa anggota polisi seperti Pendang Kalengkongan dan Ardani Ali dalam mempersiapkan peristiwa itu sangat penting. Mereka adalah teman dan kaki tangan Nani Wartabone yang membantu mengatur siasat, membujuk polisi agar memihak pada perjuangan rakyat. Pendang juga yang selalu mencari berita-berita dari pihak Belanda untuk disampaikan kepada Nani Wartabone. Pada malam persiapan pergerakan itu, Pendang Kalengkongan telah diberikan informasi secara rahasia oleh Nani Wartabone. Pendang dimintakan untuk menjaga agar polisi tetap tenang di tangsinya, dan rakyat yang akan bergerak secara spontan dapat dilindungi. Pasukan inti Nani Wartabone, terdiri atas 300 orang anggota *nulunga* diatur supaya sebelum subuh sudah siap di tanah lapang Suwawa, yaitu desa Boludawa.

Ada pula kegiatan awal, yang turut mematangkan munculnya peristiwa itu. Terjadi pertemuan rahasia yang tidak resmi dalam suatu pesta di bawah pohon sawo manila di rumah ayah Nani Wartabone di Suwawa. Pembicaraan itu tidak menentukan tanggal pergerakan, hanya mencari jalan keluar untuk mencegah tindakan pembumihangusan oleh Belanda.

Peristiwa lain adalah pertemuan tokoh-tokoh politik pada tanggal 15 Januari 1942 yang dipimpin oleh Kusno Danupoyo, yang memutuskan pembentukan komite 12. Pertemuan itu tidak dihadiri oleh Nani Wartabone, untuk menjaga kerahasiaannya. Nani Wartabone sengaja tidak hadir, karena mata-mata Belanda selalu mengamati gerak-geriknya, terutama kegiatannya dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik. Mereka sepakat, Nani Wartabone diangkat sebagai Ketua Komite 12. Rupanya anggota komite itu percaya bahwa Nani Wartabone yang paling tepat menjadi pemimpin.

Pengangkatan itu sebagai penghargaan dan pengakuan terhadap kelebihan Nani Wartabone sebagai tokoh utama dalam pergerakan kemerdekaan. Dalam pertemuan itu, tidak carakan tanggal aksi gerakan rakyat itu. Malah mereka tidak tahu, telah terjadi peristiwa patriotik itu. Komite 12 hanya membicarakan penyatuan kekuatan untuk menyelamatkan rakyat dan aset rakyat dari upaya penghancuran oleh Belanda, dan bagaimana menghadapi Jepang agar rakyat tidak korban dengan kekerasan mereka.

Kalau dilihat pada persiapan munculnya peristiwa, dapat diduga bahwa penetapan tanggal 23 Januari 1942 itu diputuskan sendiri oleh Nani Wartabone. Ada beberapa motivasi putusan sendiri, hari kejadian itu: (1) Nani Wartabone

ingin segera menyelamatkan aset-aset rakyat agar tidak dibakar oleh Belanda, (2) ia ingin segera membebaskan rakyat dari rasa takut dan penindasan Belanda dan antekanteknya, (3) ingin merahasiakan peristiwa itu sebelum terjadi, agar Belanda tidak bersiap-siap (lengah) dan tidak melarikan diri sebelumnya, (4) ingin diarahkannya secara etis sehingga tidak akan terjadi pertumpahan darah atau balas dendam juga penyusupan dan penjarahan, dan (5) ia ingin mendahului masuknya Jepang ke Gorontalo untuk menangkap Belanda.

Siasat yang terakhir ini bertujuan agar tidak terjadi perang Belanda dan Jepang di Gorontalo yang akan menimbulkan jatuhnya korban pada rakyat. Di satu pihak sebagai siasat, agar Jepang tidak mencurigai Gorontalo. Nani Wartabone telah tahu watak Jepang yang sangat kejam. Ia ingin menyerahkan Belanda sebagai tawanan kepada Jepang. Siasat ini ternyata dapat dilaksanakan setelah peristiwa 23 Januari 1942. Tawanan orang-orang Belanda itu diantar oleh Ardani Ali dan Buluati kepada tentara Jepang di Manado. Pada saat itu ada pesan Jepang, bahwa mereka akan ke Gorontalo.

Motivasi lain pengambil keputusan ini adalah ungkapan Soekarno bahwa apabila pecah perang dunia kedua maka itulah kesempatan bangsa Indonesia untuk bersatu. Perang Pasifik tahun 1941, memperburuk kekuatan Belanda. Nani Wartabone teguh pada ucapan Bung Karno yang isinya bahwa apabila pecah perang dunia kedua maka itulah kesempatan emas bagi bangsa-bangsa terjajah untuk merebut kemerdekaannya. Kesempatan itulah yang memberi motivasi kepada Nani Wartabone, selain kondisi-kondisi lain. Ia tepat dan cerdas memperhitungkan situasi dan menentukan kesempatan.

## **3.6 Puncak Pristiwa 23 Januari 1942**

### **3.6.1 Penggalangan Massa**

Sudah diungkapkan di atas, pada malam Jumat telah diadakan persiapan-persiapan secara rahasia. Ada empat kegiatan penggalangan yang dipimpin langsung oleh Nani Wartabone.

Pertama, mengadakan persetujuan keluarga untuk mendukung kegiatan itu, sekaligus mengambil langkahlangkah penyelamatan apabila ada resiko yang terburuk. Ayah Nani Wartabone mendukung sepenuhnya, aksi yang akan dilaksanakan Nani Wartabone. Istri dan anak-anaknya segera disingkirkan kalau ada resiko yang berbahaya. Nani Wartabone dengan ayahnya telah menyiapkan senjata bersama peluru, apabila diperlukan.

Kedua, menghubungi dan mengatur siasat bersama. Pendang Kalengkongan agar tangsi polisi diamankan. Semua senjata polisi dimasukkan ke gudang, dan peranan Ardani Ali yang sangat penting pula untuk membujuk kawan-kawannya. Pendang dalam hal ini berperan sebagai pengaman terhadap Nani Wartabone dan rakyat, pada peristiwa tersebut. Kesepakatan antara Nani Wartabone dengan Pendang Kalengkongan itulah yang menentukan gerakan 23 Januari 1942 itu.

Ketiga, menyebarkan kurir-kurir rahasia pada sebelum subuh agar memotivasi rakyat secara spontan untuk ikut dalam kegiatan puncak itu. Kegiatan ini hanya dipercayakan kepada beberapa orang temannya, yang mampu memegang rahasia. Dikhawatirkan jangan sampai bocor, yang akan menimbulkan kesiapan pada pihak Belanda.

Keempat, mengumpulkan pasukan inti hulunga di lapangan Boludawa, menggembleng mereka dengan cara-cara yang etis, serta mengajak keluarga dan rakyat sekitar untuk ikut pada pagi harinya. Mereka memakai pita pengikat kepala merah putih, sebagai lambang bahwa perjuangan itu adalah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tujuan bukan semata-mata untuk rakyat Gorontalo, tetapi jiwa semangatnya adalah nasionalisme dan kemerdekaan. Mereka memakai senjata apa saja, yaitu keris, pedang, dan pisau. Mereka diwanti-wanti agar tidak melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Inilah yang menyebabkan mengapa peristiwa itu tidak berdarah. Dari sistem pengaturan dapat dipahami bahwa aksi 23 Januari 1942 adalah terkendali, teratur, dan mempunyai kesamaan dan kesatuan tujuan. Ini adalah tanda suatu gerakan perjuangan modern, di mana ada pemimpin yang ditaati, ada tujuan yang ingin dicapai, ada metode atau cara melaksanakan dan diikuti, serta ada massa yang teratur dan tertib. Semua diatur secara rapi dibawah komando Nani Wartabone.

### **3.6.2 Gerakan Massa**

Menurut kisah Manuli (Tuloli, 1990:366-374) yang berjudul *Tanggomo Teme Jonu*, kesiapan rakyat itu sejak larut malam sebelum subuh. Ada ungkapan Manuli, “Bapak Jonu kasihan, pada malam Jumat, menyediakan senjata. Berkumpul rakyat, telah meminta berkah, berkah dari Allah, mati dalam perang, jangan lagi ditakuti, ayah siap di belakang. Ketika hari telah larut, muncullah bulan, sudah siap di Suwawa-Gorontalo, sudah siap di jalanan”.

Dari potongan sajak tanggomo ini dapat diduga bahwa keberangkatan ke Gorontalo itu dimulai malam mendekati subuh, ketika bulan telah muncul. Dalam penuturan para informan juga, hari Jumat pagi itu pasukan Nani Wartabone bersama dukungan rakyat berangkat dari Suwawa menuju ke Gorontalo, yang berjarak lebih kurang 11 kilometer. Pada waktu pasukan ini melewati kampung atau desa lain, maka rakyat berhamburan keluar dari rumah dan spontan bergabung dengan pasukan dari Suwawa.

Penentuan waktu mendekati subuh itu sangat strategis mengingat jarak tempuh perjalanan menuju ke Kota Gorontalo. Perhitungan ini didasarkan pada situasi dan konteks dalam masyarakat pada saat itu. Nani Wartabone tidak menunggu kesempatan, tetapi menciptakan kesempatan.

Semua pasukan dan kelompok-kelompok masyarakat lain seperti Cina, Arab, dan dari wilayah lain siap di kota pada pagi hari. Orang-orang Belanda masih berada di rumah, dan tidak mengetahui bahwa pagi itu mereka akan ditangkap oleh pasukan Nani Wartabone. Sehingga pada saat penangkapan itu, mereka heran dan kaget bahkan ketakutan. Jadi gerakan massa itu terdiri atas dua komponen, yaitu pasukan inti Nani Wartabone dan massa rakyat sebagai pendukung. Pasukan inti itulah yang bertugas untuk menangkap Belanda, dan rakyat ikut membantu apabila dalam kondisi yang sangat gawat. Malah rakyat turut memotivasi dengan teriakan, yel-yel "Waqupa Walanta" Tangkap Belanda'. Nani Wartabone berperan sebagai pimpinan pucuk, tetap menjaga agar dalam penangkapan itu tidak terjadi tindakan yang brutal, kasar, penjarahan, dan penyiksaan. Etika dan moral, sebagai dasar kultural rakyat Gorontalo sangat dipegang teguh.

### **3.6.3 Penangkapan-Penangkapan**

Sekitar subuh pasukan Nani Wartabone dengan rakyat dari Suwawa dan daerah yang dilaluinya, tiba di kota Gorontalo. Anak buah Pendang Kalengkongan dan Ardani Ali dari polisi segera bergabung. Yang mula-mula dikuasai adalah tangsi polisi dan penangkapan terhadap Kepala Polisi Belanda. Nani Wartabone mengingatkan: "Markas dan tangsi polisi telah dikuasai oleh pemuda dan rakyat. Sebaiknya Tuan menyerah saja". Kepala polisi yang besar itu ingin mencabut pistolnya, tetapi bedil Nani Wartabone telah ditodongkan di perutnya. Segera pemuda pasukan hulunga menyerbu, merampas pistol dan melekatkan pedang, pisau dan keris ketubuh orang Belanda dan segera diringkus dan dijaga oleh beberapa orang pemuda.

Dari sana pasukan itu menuju ke runiah Kontrolir. Orang ini terkenal dengan tatapan matanya yang tajam dan menakutkan. Nani Wartabone dengan para pemuda mendekatinya dan tidak takut dengan tatapan mata penjajah itu. Kontrolir masih menanyakan: "Mengapa kamu datang di sini? Apa perlunya? Segera pulang!". Belum selesai perkataannya, Nani Wartabone telah menodongkan bedilnya, yang diikuti oleh gerak cepat para pemuda. Hampir terjadi insiden, namun Nani Wartabone mengingatkan: "Tidak boleh seorang pun yang menyakitinya atau keluarganya. Barang-barang milik orang Belanda tidak boleh diambil. Siapa yang melanggar perintah ini, Akulah yang akan mengadilinya". Kontrolir segera dijaga oleh beberapa pemuda di rumahnya.

Nani Wartabone memimpin lagi penangkapan tuan Petrus. Tuan Petrus orang yang ramah. Ia keluar dengan keramahannya. Nani Wartabone dengan ramah pula mengatakan: “Lebih baik Tuan Petrus menyerah saja kepada kami. Dan kami akan memperlakukan Tuan dengan baik”. Tuan Petrus tidak melawan. Beberapa pemuda mendampinginya di rumah itu.

Ada seorang pejabat Belanda, yang oleh rakyat disebut Tuan Lamuqo (Manuli, dalam Tuloli, 1990:370). Ketika ia melihat orang banyak berkumpul di jalan dan di rumah-rumah Kontrolir dan Petrus (dalam bahasa Gorontalo ti Petulu), ia sudah mempunyai firasat yang buruk. Dengan segera ia melarikan diri, dan naik sebuah truk. Namun rakyat banyak dapat mengejar dan menahan truk itu. Orang itu diturunkan lalu ditangkap dan dibawa ke rumah Kontrolir.

Penangkapan itu berjalan sangat mulus, tanpa mengeluarkan peluru, tanpa menikamkan senjata tajam. Darah tidak tertumpah, baik pada pihak Belanda maupun rakyat. Sebelum pukul sembilan pagi semua pejabat pemerintah Belanda, yang berjumlah lebih kurang 20 orang itu sudah ditangkap. Mereka disatukan dengan Kontrolir, Asisten Residen, Petrus, Kepala Polisi, dan dibawa ke penjara. Kepala polisi merasa tersinggung. Ia melawan untuk masuk penjara. Pada saat itu muncullah Ardani Ali (polisi) yang menariknya ke penjara, lalu mendorongnya ke dalam. Rupanya ia tidak rela merasakan apa yang dialami rakyat yang ditahan dalam penjara. Penjara dibuat hanya untuk bangsa Indonesia, bukan untuk Belanda. Ternyata Belanda harus masuk ke dalam penjara buatannya sendiri.

Rakyat yang ditahan Belanda dikeluarkan dari penjara. Mereka berteriak-teriak gembira, sambil mengucapkan terima kasih kepada Nani Wartabone dan para pemuda. Suasana rakyat di kota, yang telah datang dari berbagai pelosok Gorontalo, tampak sangat gembira. Ada yang mengucurkan air mata, karena mengingat penderitaan yang dialami selama pemerintahan Hindia Belanda. Ada yang bergembira karena telah tercapai cita-cita kemerdekaan.

#### **3.6.4 Pengibaran Bendera Merah Putih dan Rapat Rakyat**

Selesai penangkapan terhadap Belanda, Nani Wartabone memimpin rakyat untuk menurunkan bendera Belanda, merahputih-biru, dan menggantikannya dengan bendera nasional, merah putih. Yang mula-mula diturunkan adalah bendera di depan kantor pos. Kain warna biru dirobek, lalu sisanya merah putih dinaikkan kembali. Ada juga informasi lain, bahwa pada saat itu sekretaris Komite 12 U.H. Buluati memancang bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen di dinding kantor pos atau tepatnya di lapangan Taruna remaja Gorontalo.

Rakyat diarak ke alun-alun di depan rumah Asisten Residen (sekarang rumah Gubernur Gorontalo). Bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera nasional merah putih. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan penuh semangat, terutama oleh pemuda-pemuda dan siswa-siswa yang telah menguasai lagu tersebut. Orang tua terharu, dan merasa bersyukur. Ketika itu rakyat menanti apa yang akan diperintahkan pemimpin mereka.

Nani Wartabone tidak banyak berkata-kata, karena banyak yang harus dikerjakan seperti pemerintahan dan keamanan. Ia berpidato, yang isinya “Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh Pemerintahan Nasional”. Rakyat menyambut pidato itu dengan semangat.

Peristiwa singkat itu dapat dianalogkan sebagai proklamasi kecil di daerah. Ada beberapa hal, yang bisa dijadikan simbol analogi tersebut, yaitu :

1. Adanya seorang pemimpin yang memimpin rakyat;
2. Penangkapan pemerintah Belanda, yang kemudian menggantikannya dengan pemerintahan Nasional yang berada di Gorontalo;
3. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam peristiwa tersebut tanpa melihat suku, agama, jabatan, pencaharian, dan status;
4. Dikibarkannya bendera nasional merah putih; Dinyanyikannya lagu Indonesia Raya, sebagai lagu nasional;
5. Dipakainya Bahasa Indonesia pada waktu rapat rakyat dalam pidato pemimpinnya;
6. Dinyatakannya bahwa bangsa Indonesia yang berada di Gorontalo telah bebas dari penjajahan.

Pada hakikatnya dapat dikatakan, peristiwa 23 Januari 1942 itu, adalah pergerakan perjuangan rakyat di daerah Gorontalo yang bernuansa dan bersifat nasional.

### **3.6.5 Pembentukan Pemerintahan dan Keamanan**

Para anggota Komite 12 dan para wedana, bekas aparat Belanda diundang oleh Nani Wartabone untuk mengadakan pertemuan, bertempat di rumah bekas Asisten Residen. Dalam pertemuan itu Nani Wartabone menawarkan, agar dibentuk pemerintahan baru di Gorontalo. Bekas Wedana itu masih ada yang ragu, bahkan ada yang masih menginginkan kembalinya pemerintahan Belanda. Suasana menjadi panas dan tegang, para pemuda mulai menuntut agar para Wedana dimasukkan ke dalam penjara. Dengan penuh wibawa dan kesabaran, Nani Wartabone mengatakan secara tegas: "Apakah yang Tuan-tuan peroleh dari Belanda itu. Bukankah kita ini telah menderita ratusan tahun? Rakyat telah diisap darah dan dagingnya. Saya tidak bertanggung jawab kalau rakyat dan pemuda akan menyerbu dan menangkap Tuan-tuan". Masih banyak kata-kata bersemangat dan meyakinkan yang diucapkan Nani Wartabone. Akhirnya setelah mendengar niat baik dan luhur, serta keberanian Nani Wartabone para wedana itu menjadi sadar. Apalagi pada saat itu beberapa pemuda mulai mendesak agar para wedana itu ditangkap dan dimasukkan kepenjara bersama tuan-tuan besar mereka. Dibentuklah suatu pemerintah yaitu Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) dengan Nani Wartabone sebagai ketuanya. PPPG beranggotakan komite 12 dan para wedana yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan rakyat. Semuanya menyatakan setuju dan menandatangani keputusan itu.

Hasil keputusan kedua adalah pembentukan pelaksana keamanan. Pada formasi ini, selain Pendang Kalengkongan dan Ardani Ali, ditunjuk pula pimpinan kepaduan yaitu Ibrahim Mohamad, yang kemudian Amin Lakeren. Pasukan

keamanan ini menggunakan polisi-polisi, pemuda-pemuda, dan pandu. Diaturlah pembentukan pos-pos keamanan yang dipelopori oleh Ibrahim Mohamad. Setiap wilayah kewedanaan ditunjuk pula komandan keamanan.

Tugas-tugas keamanan antara lain :

1. Menerbitkan masyarakat agar tidak takut dan kacau
2. Menjaga jangan ada yang menggunakan kesempatan seperti balas dendam dan kerusakan lain
3. Menurunkan bendera Belanda dan menggantikan dengan bendera nasional Indonesia tanggal 27 Januari 1942 di Lapangan Besar Gorontalo
4. Membentuk pos-pos keamanan rakyat agar tidak timbul halhal yang tidak diinginkan

Sejak hari itu, di seluruh wilayah Gorontalo didirikan pos-pos penjagaan yang dipelopori oleh pemuda dan pandu. Langkah sebenarnya pemerintahan nasional di Gorontalo. Hal ini menjadi tanda bahwa secara penuh kemerdekaan rakyat yang ada di Gorontalo telah berada di tangan bangsa Indonesia. PPPG berfungsi sebagai badan eksekutif dan legislatif. Sedangkan untuk angkatan perangnya adalah pasukan keamanan yang dipimpin oleh Pendang.

### **3.6.6 Keberhasilan yang Gemilang**

Peristiwa 23 Januari 1942, menjadi lambang keberhasilan perjuangan yang sampai kini diperingati oleh rakyat Gorontalo. Di mana saja ada kelompok orang Gorontalo, baik penduduk asli maupun keturunan, selalu berupaya memperingati peristiwa patriotik itu. Bagi masyarakat Gorontalo, peristiwa itu dipandang sebagai aksi yang bersifat nasional di daerah, karena hakikat perjuangannya bukan semata

untuk rakyat Gorontalo, tetapi adalah bukti perjuangan kebangsaan yang untuk meraih kemerdekaan.

Karakteristik peristiwa ini adalah pergerakan yang tidak berdarah. Timbul pertanyaan mengapa tidak berdarah, pada hal bila terjadi aksi seperti itu sering menelan korban. Jawabannya adalah:

- a. Dalam aksi 23 Januari 1942 tercermin landasan budaya

Gorontalo yang cinta damai dan cinta keamanan. Budaya Gorontalo bertolak dari syariat Islam. Landasan inilah yang menyebabkan, Nani Wartabone melarang pengikutnya untuk berbuat jahat kepada Belanda. Peristiwa 23 Januari 1942 bukanlah pembalasan dendam, melainkan suatu perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan dan Perjuangan yang diletakkan pada keberadaan hakikat manusia dan kemanusiaan.

- b. Nani Wartabone tidak ingin menodai perjuangan luhur itu. Kalau terjadi penjarahan, pembunuhan, dan penganiayaan maka perjuangan luhur itu bisa ternoda. Ia ingin memberikan suatu kesan yang baik kepada Belanda, bahwa bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo berjuang untuk mencapai cita-cita yang luhur, dengan cara-cara yang manusiawi dan etis.

- c. Lancarnya penangkapan, penaikan bendera, pembentukan pemerintahan menunjukkan ketinggian intelegensia Nani Wartabone mengatur siasat. Ia mahir dalam membaca situasi, lalu tepat menentukan cara yang wajar dan cocok dengan situasi itu. Ia tidak mendahulukan emosi yang rendah, tetapi mengemukakan nalar yang terkendali: caracaranya menggembleng pemuda melalui hulunga, siasatnya merahasiakan hari puncak kepada orang lain,

kehebatannya mengatur teman dekatnya, dan ketepatannya mengambil waktu, adalah bukti kecemerlangan berpikir untuk mengatur siasat.

- d. Kepercayaan pengikut kepada Nani Wartabone, yang didukung oleh kharisma pribadi, kejujuran, dan keikhlasan menjadi pilar pendukung keberhasilan yang gemilang itu. Semua orang menyatu untuk tidak melanggar aturan dan perintahnya. Tidak ada yang berupaya menyeleweng untuk membuka rahasia persiapan menjelang hari puncak, menjadi tanda bahwa Nani Wartabone adalah tokoh pemimpin yang didambakan rakyat untuk membawa mereka ke arah yang baik.

Itulah jawaban, mengapa peristiwa besar itu tidak menimbulkan meletusnya senjata, tidak tertikamkan senjata tajam, dan tidak mengalirnya setetes darah pun. Kuncinya adalah hati nurani, etika, dan moralitas pemimpin yang mampu mempertimbangkan perilaku baik dan buruk, ganjaran kepuasan terhadap kebaikan dan cemooh terhadap keburukan, dan mencari kesenangan hati semua orang dan menghindari kebencian dan balas dendam (lihat Ismail dan Mutawalli, 2003:259).

### **3.7 Kedatangan Jepang di Gorontalo**

Pasukan Jepang masuk ke Gorontalo pada tanggal 26 Februari 1942 dengan menaiki kapal perang angkatan laut Jepang, yang membawa pasukan militer dipimpin oleh Kolonel Yamai. Pemerintahan mereka terkenal dengan nama Ken Kan Rikan. Nani Wartabone menyamiut dengan baik kedatangan Jepang, sebagai upaya agar mereka tidak melakukan kekejaman kepada rakyat. Ketika Jepang masuk, rakyat mulai berhati-hati, karena ada kecurigaan terhadap siapa yang membantu Belanda. Namun mereka datang untuk berunding dengan PPPG dalam

rangka kerja sama. Kedatangan kedua Jepang, 5 Maret 1942 melalui pelabuhan Kwandang, dipimpin oleh Kolonel Yamada. Kunjungan ini merupakan kunjungan kehormatan kepada PPPG dan Nani Wartabone.

Selama enam bulan pemerintahan sipil masih ditangan PPPG di bawah pimpinan Nani Wartabone. Bendera nasional dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Lagu Indonesia Raya dilagukan bersama lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo). Nani Wartabone tetap memimpin pemerintahan. Ajakan untuk kerja sama oleh Jepang ditolak oleh Nani Wartabone. Ia menuntut agar Jepang mengakui Indonesia merdeka.

Setelah kekuatan pasukan Jepang semakin kuat, maka pada 6 Juni 1942 pemerintahan diambil oleh Jepang dan Nani Wartabone tetap dianggap sebagai pendamping yang dihormati dengan jabatan *Gunco Kaigi Gico* . Nani Wartabone menolak, dan memilih kembali bertani. Kecurigaan Nani Wartabone kepada Jepang memang telah tumbuh sebelum kedatangan mereka. Namun ia tetap bermuka manis karena ingin menyelamatkan rakyat. Suasana mulai berubah, karena Jepang mulai menjalankan pendudukannya atas Gorontalo. Makanan makin susah, dan orang yang membawa makanan dari satu tempat ke tempat lain dicurigai. Belum lagi ada mata-mata Jepang yang dikenal dengan sebutan *Mite* (bahasa jepang) , yang selalu membuat laporan yang tidak benar kepada Jepang. Banyak rakyat dipukuli, dipenjarakan, bahkan perempuan dirusak. Suasana ini meyebabkan Nani Wartabone mulai menjauhi Jepang, Ia kembali ke rumahnya untuk berkebun.

Puncak kemarahan Nani Wartabone ketika lima orang dari Limboto antara lain Ali Palalu dan Kasim dipancang Jepang. Mereka ditangkap karena membawa makanan dari kebun ke rumah mereka dengan gerobak. Mereka dipancang di depan rakyat, dan Nani Wartabone diminta Jepang menyaksikannya. Kepada temannya, Sinyo Hasan, Nani Wartabone mengatakan: "Inilah yang Aku tidak suka pada Jepang". Ia langsung pulang ke rumahnya, ia menangis melihat peristiwa itu. Pembelaannya terhadap rakyat muncul. Namun ia tidak bisa berbuat banyak, karena menjaga keselamatan rakyat dari penyiksaan Jepang.

Jepang mulai mencurigai Nani Wartabone. Pembelaan Nani Wartabone terhadap rakyat mulai timbul lagi, dan ia bertekad untuk bertahan. Jepang makin curiga. Mereka khawatir Nani Wartabone akan melakukan lagi aksi seperti pada tanggal 23 Januari 1942. Pada waktu Admiral Mori datang ke Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 1942, Nani Wartabone dibujuk bekerja sama. Persyaratan yang diajukan Nani Wartabone adalah jaminan Indonesia Merdeka, pengibaran bendera merah putih, serta menghilangkan tekanan bala tantara Dai Nippon. Belum terjadi kesepakatan Nani Wartabone diperingati, belum waktunya membicarakan kemerdekaan, dan bila tidak mau bekerja sama ia bisa mendapat kesusahan. Dengan dasar itu Nani Wartabone ditangkap pada bulan Desember tahun 1943 bersama teman-temannya. Mereka dibawa ke Manado dan disiksa ditanam sampai batas leher di tepi pantai. ketika datang ombak, maka mata, telinga, dan seluruh kepala mereka ditutupi pasir. Dalam penyiksaan itu beberapa orang meninggal dunia, antara lain Rasyid Monoarfa, Datau, dan Hipi. Mereka dikembalikan ketika Jepang hampir menyerah kalah dalam perang yaitu enam bulan kemudian setelah ditangkap

pada tanggal 6 Juni 1944. Jepang Mengalami perlawanan dari masyarakat dan akhirnya menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 (Setiawan,Ed. 1994 : 38).

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Nani Wartabone menerima pemerintahan dari Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Kinoshita. pada tanggal 16 Agustus 1945. Sejak hari itu Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak 6 Juni 1942. Namun, setelah penyerahan kekuasaan itu, Nani Wartabone dan rakyat Gorontalo tidak mengetahui bahwa telah terjadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta keesokan harinya. Mereka baru mengetahuinya pada 28 Agustus 1945.

Untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang itu, Nani Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Mereka dibekali dengan senjata hasil rampasan dari Jepang dan Belanda. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti, Suwawa. Wilayah ini sangat strategis, berada di atas sebuah bukit yang dilingkari oleh beberapa bukit kecil, dan bisa memantau seluruh kota Gorontalo. Di tempat ini pula, raja-raja Gorontalo zaman dahulu membangun benteng-benteng pertahanan mereka.

Setelah menerima berita proklamasi di Jakarta, pada tanggal 1 September 1945 Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan. Dewan yang beranggotakan 17 orang ini terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat dan ketua partai politik. G.A. Maengkom yang pernah menjadi Menteri Kehakiman RI dan Muhammad Ali yang

pernah menjadi Kepala Bea Cukai di Tanjung Priok mereka adalah dua dari 17 orang anggota dewan tersebut.

### **3.8 Latar Belakang Kemerdekaan Republik Indonesia**

Pada tanggal 6 Agustus 1945 tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di kota Hiroshima-jepang, yang menyebabkan semangat moral dari tantara Jepang mulai menurun. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "*Dokuritsu Junbi Cosakai*", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga *Dokuritsu Junbi Inkai* dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pada tanggal 9 Agustus 1945, tantara Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki agar daya destruktifnya lebih dahsyat, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang.

Tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta

mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2. Setelah itu membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan UUD yang sebelumnya telah disiapkan oleh Hatta.

Tanggal 16 Agustus tahun 1945 Gejolak tekanan yang menghendaki pengambil ahli kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pengikut Syahrir. Pada siang hari mereka juga berkumpul di rumah Hatta, dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Ada Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, yang disusul pengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus. Dengan beberapa kesepakatan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno-Hatta beserta 15 pemuda yang hadir maka mereka memutuskan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tepat pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadhan 1365 Hijriah, pukul 10.00 pagi. Bertempat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No.56, Jakarta. Dilakukan pembacaan naskah Proklamasi yang berlanjut

pengibaran Sang Saka Merah Putih hasil jahitan ibu Fatmawati, menandakan Indonesia merdeka. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan Proklamasi diantaranya, tiga pemuda pengibar bendera merah putih pertama yaitu Latif Hendraningrat, S. Suhut dan Tri Murti. Teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta adalah demikian “ *Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain. diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.*” Bersamaan dengan itu bapak Soekarno-Hatta resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

### **3.9 Agresi Militer Belanda dan Siasat Licik Belanda**

#### **3.9.1 Agresi Militer Belanda I**

*Operatie Product* dalam bahasa Indonesia disebut Operasi Produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatra terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati. Kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan

Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945 pasukan sekutu (pasukan Inggris) dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA di bawah pimpinan Van Mook atas perintah Kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia (Indonesia) di bawah naungan Kerajaan Belanda.

Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Soetan Sjahrir, Mohammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus hingga Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km. dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, Agresi Militer Belanda I pun dimulai.

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini

sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

### **3.9.2 Agresi Militer Belanda II**

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak dalam bahasa Belanda disebut *Operatie Kraai* terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet Republik Indonesia mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatra untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai" . Pukul 2.00

pagi *le para-compagnie* para pasukan di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pada pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo.

Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatra, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil.

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pengeboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam

keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban. Perlu dijelaskan bahwa pada saat *Clash* kedua antara Belanda tidak pernah mengambil tawanan perang, mereka selalu mengeksekusi (membunuh tawanan perang), karena itu korban di pihak TNI sangat besar.

Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. Van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta. Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Jendral Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00.

Jendral Soedirman dalam keadaan sakit keras (kendali paru-paru beliau tinggal sebelah) melaporkan diri kepada Presiden. Jendral Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter

pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Jenderal Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi beliau menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.

Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatra, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatra, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta

staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.

Setelah tantara Belanda mengepung Istana Priseden di Jogja, Belanda menangkap presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Empat Menteri sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan, Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk *Exile Government of Republic Indonesia* di New Delhi, India.

Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.

Pada pukul 07.00 WIB tanggal 22 Desember 1948 Kolonel D.R.A. Van Langen memerintahkan para pemimpin republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat pembom B-25 milik angkatan udara Belanda, tidak satupun yang tahu arah tujuan pesawat, pilot mengetahui arah setelah membuka surat perintah di dalam pesawat, akan tetapi tidak disampaikan kepada para pemimpin republik. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal

pinang (sekarang Bandara Depati Amir) para pemimpin republik baru mengetahui, bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatra Utara, untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Parapat, sementara Drs. Moh. Hatta (Wakil Presiden), RS. Soerjadarma (Kepala Staf Angkatan Udara), MR. Assaat (Ketua KNIP) dan MR. AG. Pringgodigdo (Sekretaris Negara) diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Corps Speciale Troepen.

Setelah itu Jendral Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat *Totaliter* yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber *wingate* (menyusup ke belakang garis musuh) dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.

Istilah *Wingate* berasal dari kendali perang antara sekutu (Inggris, Amerika) di front Asia (Burma). Pada saat itu seorang perwira Inggris bernama Wingate diperintahkan oleh pimpinan tertinggi sekutu di Asia (Lord Louis Mount Batten) untuk menyusup ke garis belakang front Jepang dan melakukan perang gerilya guna memecah konsentrasi antara Jepang.

Salah satu pasukan yang harus melakukan *wingate* adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Divisi siliwangi berhasil menyusup ke Jawa Barat dan melakukan perang gerilya melawan antara Belanda.

### **3.10 Konvrensi Meja Bundar (KMB)**

Menurut data Wikipedia, Indonesia yang menyatakan bahwa Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Menyusul Perjanjian Roem-Royen pada 6 Juli 1949, yang secara

efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Mohammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli sampai 2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag.

Negosiasi yang dilakukan dalam Konferensi Meja Bundar (*Round Table Conference*) menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda "dalam waktu sesingkat-singkatnya", serta Republik Indonesia Serikat memberikan status *bangsa paling disukai* kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat.

Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan, dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada 1942. Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota AS dalam komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda.

Permasalahan mengenai Papua Barat juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia, kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi Perjanjian Meja Bundar jika poin ini disepakati. Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949 suatu kesepakatan diperoleh, status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

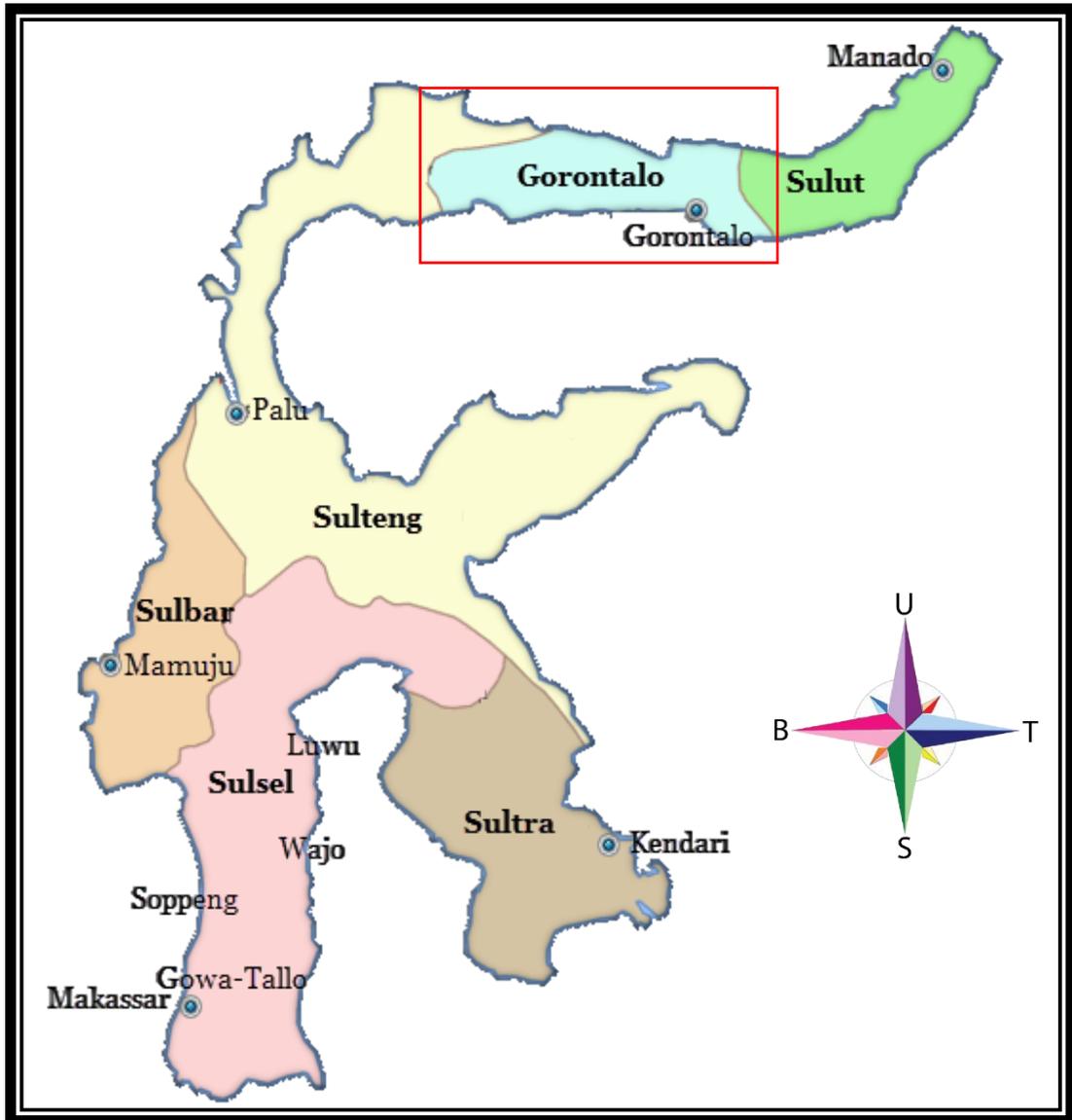
Konferensi secara resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Adapun hasil yang diperoleh dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

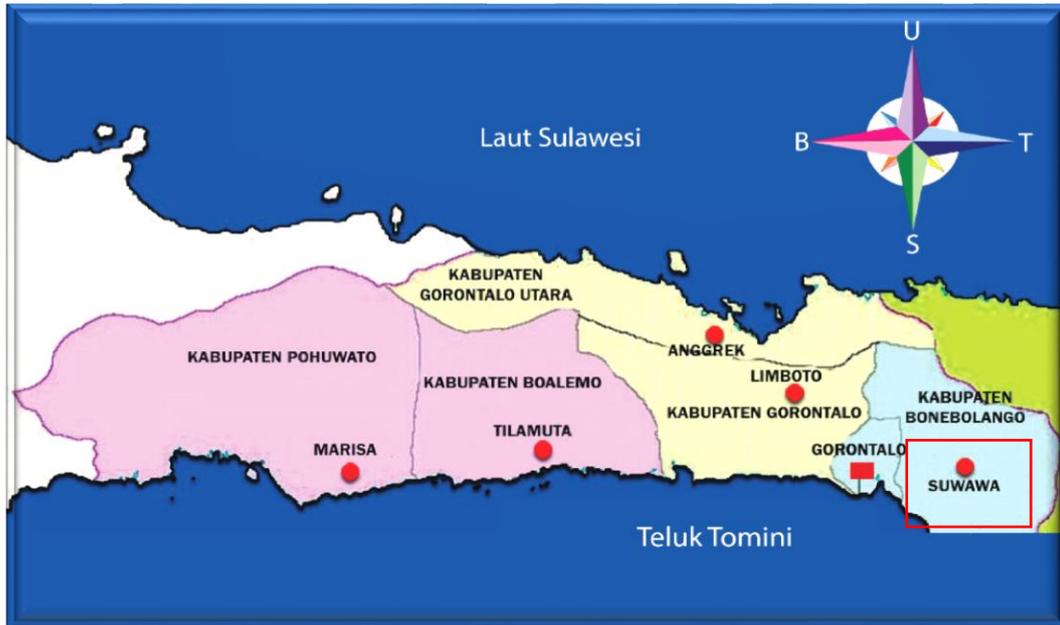
Pada proses sejarah selanjutnya setelah RIS (Republik Indonesia Serikat) terbentuk, negara-negara federal buatan Belanda membubarkan diri dan bergabung dengan RI (Republik Indonesia) Pimpinan Soekarno dan Hatta maka mulai saat itu secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersendikan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan Pancasila

Pada proses sejarah yang telah terjadi di Gorontalo dalam melawan penjajahan Belanda, serta tentara Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu selain itu kolonial-kolonial Belanda ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang Gorontalo yang dipimpin oleh Nawi Wartabone, seorang tokoh pejuang nasional Gorontalo. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa cita-cita Nani Wartabone untuk bebas dari penjajahan telah terwujud meskipun dengan

perjuangan dan pengorbanan yang berat untuk melawan penjajahan tersebut. Nani Wartabone tidak berjuang sendiri, namun terdapat banyak campur tangan tokoh-tokoh nasional yang membantu perjuangan Nani Wartabone serta masyarakat Gorontalo yang melakukan perjuangan dan pengorbanan untuk melawan penjajah. Puncak perjuangan tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 1942 dan dikenal dengan hari patriotik yang selalu diperingati setiap tahun oleh masyarakat Gorontalo untuk mengenang jasa-jasa Nani Wartabone.



Gambar 3.1 Peta Sulawesi



**Gambar 3.2 Peta Provinsi Gorontalo**



**Gambar 3.3 Foto Udara Lokasi Patung Nani Wartabone di Kota Gorontalo**



**Gambar 3.4 Skematik Lokasi Patung Nani Wartabone di Kota Gorontalo**